

RINGKASAN

Oktavian Agung Paradigma. 2021. Implementasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 Terkait Rumah Tidak Layak Huni (Studi Pada Desa Kertonegoro Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo),
Pembimbing I : Dra. Bernadeta Nefo E. W., M.Si dan Pembimbing II : Husni Mubarq, S.Fil.I., M.IP

Desa Kertonegoro merupakan salah satu desa dari Kecamatan Pakuniran yang Melakukan program Bantuan RTLH yang mana dari sebagian masyarakat yang rumah mereka masih jauh dari kriteria layak dan kondisinya atap genting rusak, dinding tidak permanen gedeg kayu , tidak memiliki pencahayaan matahari, lantai dari tanah, dan rumah lembab .

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 Terkait Rumah Tidak Layak Huni (Studi Pada Desa Kertonegoro Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Model Miles dan Huberman (Agustino, 2017) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 Terkait Rumah Tidak Layak Huni (Studi Pada Desa Kertonegoro Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo). Sudah berjalan dengan baik yang menggunakan pendekatan dari teori implementasi George C.Edward III awalaupun ada sedikit kendala yang dimana ada pengurangan unit RTLH yang awalnya ada 15 unit dan dikurangi menjadi 12 unit kemudian dipindahkan ke bantuan langsung tunai yang dana 3 unitnya yang dimana sesuai peraturan pemerintah dana dari desa sebagian di pergunakan untuk bantuan covid.Di Desa kertonegoro pada tahun 2020 berfokus pada Dusun Krajan, penerima bantuan rumah tidak layak huni sudah mencapai 80 persen, dan ada 12 unit RTLH yang sudah terlaksana yang mencapai 80 persen.Dana yang digunkan dari dana APBDDES yang dimana pemerintah tidak ikut partisipasi dalam program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Kertonegoro

Kata kunci : RTLH, kebijakan publik, implementasi